

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien, Cetakan kedua, 2015, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, cetakan keempat, 2015, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono, Boedi, Cetakan ketiga, 2015, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1979, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.
- , cetakan ke-3, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismail, Nurhasan, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta
- Kamilah, Anita, 2013, *Bangun Guna Serah (Built Operate and Transfer/BOT) Membangun tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Keni Media, Bandung, hlm 101.
- Kansil, CST dan Christine S.T. Kansil, cetakan pertama, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki.Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, cetakan keempat, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , cetakan pertama. 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- , cetakan keenam, 2018, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Parlindungan, A.P, cetakan ketiga, 2015, *Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Wantjik, 1982, *Hak Anda atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Santoso, Urip, Cetakan kedua, 2013, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , cetakan kelima, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , cetakan pertama, 2017, *Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*, Kencana, Depok.
- , cetakan kedua, 2017, *Perolehan Hak atas Tanah*, Kencana, Depok.
- Saputra, Rendy, cetakan pertama, 2016, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sembiring, Julius, cetakan kedua, 2018, *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, cetakan kedua, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- , 2016, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan. Perjanjian Build. Operate and Transfer (BOT) atas Tanah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Soenandar, Taryana, Mariam Darus Badruzaman dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, cetakan ke dua puluh satu, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, cetakan ke-19, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.

-----, cetakan ke-11, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Alfabeta, Bandung.

Sumardjono, S.W. Maria, 2008, *Tanah dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.

-----, 2020, *Penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria dari Masa ke Masa*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Soenandar, Taryana, Mariam Darus Badruzaman dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Milik Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Supriyadi, cetakan ke-9, 2019, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Prasetya, Hadyan Iman, “Pengelolaan Tanah Negara oleh Pihak Ketiga ditinjau dari Perspektif Hukum Pertanahan dan Perbendaharaan Negara”, *Jurnal BPPK Kemenkeu, Simposium Nasional Keuangan Negara*, Jakarta, 2018.

Rahmi, Elita, “Eksistensi Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto*, 2010.

Rongiyati, Sulasi, “Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga”, *Jurnal Negara Hukum Volume 5 Nomor 1, Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta, 2014.

Santoso, Urip, “Perjanjian Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas”, *Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Februari 2014.

Santoso, Urip, “Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional”, *Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, 2012.

Santoso, Urip, “Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga”. *Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto*, 2013.

Santoso, Urip, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan atas Tanah”.
Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.

Skripsi/ Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian

Andora, Hengki, “Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah
(Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem
Hukum Indonesia)”, *Disertasi*, Program studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2019.

Ariyanto, Dedi, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Aset Badan Usaha Milik Negara
(Studi Kontrak Pemanfaatan Lahan antara PT. PLN dengan Perum Jasa Tirta
II)”, *Tesis*, Program Studi Strata-2 Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta.
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Niko, Mohamad Besar, “Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian dalam Perjanjian
Kerjasama Pemanfaatan Asset PT. Pelindo II (Persero) Studi Kasus pada PT.
Jakarta Internasional Container Terminal)”, *Tesis*, Program Studi Strata-2
Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada. Yogyakarta, 2018.

Sasmitha, Tody, Haryo Budhiawan, Sukayadi, “Pemaknaan Hak Menguasai Negara
oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK Nomor 35/PUU-
X/2012, Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor
3/PUU-VIII/2010)”, Laporan Penelitian, STPN Press, Yogyakarta, 2014.

Sembiring, Julius, “Konstruksi hukum Penguasaan Tanah Negara dalam Sistem
Hukum Tanah Nasional”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1960 nomor 104).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan-Selanjutnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Kepentingan Perusahaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 16 Juni 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tanggal 13 Februari 2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

Internet

Letezia Tobing, “Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum”
<https://www.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

Letezia Tobing, “Lex Specialis dan Lex Generalis”,
<https://www.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”,
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>. Diakses pada tanggal 23 November 2020.